



Filsafat Negara Kepulauan Indonesia terhadap Strategi Postur TNI AL

Syaeful Bakhri

Sekolah Staf dan Komando, Indonesia

E-mail: siipul80@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-09-10 Revised: 2025-10-15 Published: 2025-11-01 Keywords: <i>Maritime Defense; Inland Waters; Strategy; Defense; World Maritime Axis.</i>	This research examines the relationship between the philosophy of an archipelagic state and Indonesia's maritime defense strategy. Based on the view that the sea serves as a unifying medium, this article aims to analyze how a philosophical perspective on Indonesia's geography shapes the posture development strategy of the Indonesian Navy. Using a descriptive qualitative method with a literature review, this study finds that the Wawasan Nusantara (Archipelagic Outlook) concept, as a manifestation of the archipelagic state philosophy, serves as the foundation for the Archipelagic Sea Defense Strategy. This strategy emphasizes deterrence, layered defense, and sea control. The key recommendations formulated include the need to develop an integrated fleet (Brown Water and Green Water Fleets), adopt asymmetric technology in a layered defense, enhance interoperability among maritime stakeholders, and implement a geopolitically-based force posture to achieve a comprehensive and credible maritime defense.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-09-10 Direvisi: 2025-10-16 Dipublikasi: 2025-11-01 Kata kunci: <i>Pertahanan Maritim; Perairan Pedalaman; Strategi; Pertahanan; Poros Maritim Dunia.</i>	Penelitian ini mengkaji hubungan antara filsafat negara kepulauan dengan strategi pertahanan maritim Indonesia. Berangkat dari pandangan bahwa laut adalah media pemersatu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif filosofis terhadap geografi Indonesia membentuk strategi pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa konsep Wawasan Nusantara, sebagai manifestasi filsafat negara kepulauan, menjadi landasan bagi Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN). Strategi ini menekankan pada penangkalan (<i>deterrence</i>), pertahanan berlapis (<i>layered defense</i>), dan pengendalian laut (<i>sea control</i>). Pembahasan utama yang dirumuskan adalah perlunya pengembangan armada terpadu (<i>Brown Water</i> dan <i>Green Water Fleet</i>), adopsi teknologi asimetris dalam pertahanan berlapis, peningkatan interoperabilitas antar pemangku kepentingan maritim, dan penataan gelar kekuatan berbasis geopolitik untuk mewujudkan pertahanan maritim yang komprehensif dan kredibel.

I. PENDAHULUAN

Filsafat sejatinya merupakan studi mengenai hakikat realitas dan keberadaan, mengenai apa yang mungkin diketahui hingga perilaku benar atau salah. Apa Itu Filsafat, berasal dari kata Yunani *Philo-Sophia* yang berarti cinta kebijaksanaan, filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup paling hakiki. Cara berpikir dalam ilmu filsafat terbilang sangat membuka wawasan, pemikiran mendasar yang dikemukakan para filsuf dahulu juga masih menjadi rujukan dalam melihat berbagai masalah yang muncul di dunia modern. Tak salah jika ilmu filsafat dikatakan sebagai ilmu tentang bagaimana pencarian makna dalam berbagai macam hal.

Dari perspektif filsafat hakekatnya bentuk negara Indonesia adalah negara kepulauan,

dengan Laut sebagai fokus medianya yang bertindak sebagai media pemersatu bangsa, media sumberdaya, media perhubungan, media pengembangan pengetahuan dan teknologi, media membangun pengaruh dan sebagai media pertahanan negara. Mutlak diwujudkan oleh Indonesia, lautan Indonesia dengan sumberdaya yang sangat besar, apabila dikelola dengan baik merupakan peluang sekaligus potensi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sebaliknya apabila tidak mampu mengamankan dan melindungi wilayah laut, maka potensinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.

Oleh karenanya seluruh perhatian, upaya dan sumberdaya, harus diarahkan dan dikerahkan untuk mewujudkan penguasaan atas laut, salah satunya melalui strategi pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI

AL) untuk menghadapi situasi di waktu perang dan di waktu damai, di mana laut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional dengan tujuan kemakmuran bangsa.

Oleh karena itu rumusan masalah pada artikel ini dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif filsafat terhadap geografi Indonesia?
2. Bagaimana strategi pembangunan postur TNI AL?

II. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif, dengan data sekunder mengumpulkan data yang ada berupa teks, gambar, video, dll. Serta studi pustaka dari beberapa buku dan artikel serta literasi lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Filosofi Negara Kepulauan

Filsafat negara kepulauan adalah sebuah cara pandang atau paradigma yang melihat wilayah suatu negara bukan sebagai daratan yang dipisahkan oleh air, melainkan sebagai satu kesatuan utuh antara darat, laut, dan udara di atasnya. Laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung dan pemersatu yang vital bagi kedaulatan, keamanan, ekonomi, dan identitas bangsa.

Filsafat ini mengubah persepsi dari yang tadinya berorientasi pada daratan (kontinental) menjadi berorientasi pada lautan (maritim). Konsep utama filsafat negara kepulauan. Dasar pemikiran ini berakar pada kondisi geografis unik sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Berikut adalah pilar-pilar utamanya:

- a) Kesatuan Wilayah (*Unity of Territory*). Konsep paling fundamental adalah bahwa seluruh pulau, perairan di antaranya, dasar laut, dan ruang udara di atasnya merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Laut internal (perairan di antara pulau-pulau) dianggap sama kedaulatannya dengan wilayah daratan.
- b) Laut sebagai Penghubung, Bukan Pemisah. Paradigma lama melihat laut sebagai hambatan dan pemisah antar pulau. Filsafat negara kepulauan membalikinya secara total. Laut dipandang sebagai jembatan, jalan raya, dan media

interaksi yang menyatukan seluruh elemen bangsa dan wilayah.

- c) Wawasan Nusantara. Filsafat ini diwujudkan dalam konsep Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang serba beragam dan strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Artinya, Pancasila menjadi landasan ideologi, sedangkan kondisi geografis sebagai negara kepulauan menjadi landasan visionalnya.

- d) Kedaulatan dan Keamanan. Dengan memandang laut sebagai bagian integral dari wilayah, negara memiliki kedaulatan penuh untuk menjaga keamanannya. Laut bukan lagi "wilayah bebas" yang bisa dimasuki siapa saja, melainkan halaman dalam rumah yang harus dilindungi. Ini memungkinkan negara untuk mengatur lalu lintas kapal asing dan mengamankan sumber daya alam di dalamnya.

Setelah mengetahui apa itu filsafat dan pengertian dari para ahli, secara umum filsafat adalah jenis ilmu pengetahuan yang bisa mendatangkan beberapa manfaat ketika mempelajari yaitu:

- a) Mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalan hingga mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapat.
- b) Membuat cara berpikir yang bijaksana, seseorang yang mendalami ilmu filsafat berdasar pada kecintaan terhadap kebijaksanaan.
- c) Membuat seseorang untuk berpikir dan merenung, bertindak atau bertindak sesuai dengan keyakinan yang dianut.

Dalam mencari pemecahan masalah diklaim akan banyak terbantu jika menggunakan ilmu filsafat, karena filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan seseorang.

2. Strategi Pertahanan Laut Nusantara

Dasar Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) adalah dari Konsepsi Strategi Pertahanan Nusantara yaitu sebagai berikut:

- a) Hakikat Pertahanan Nusantara adalah pertahanan wilayah mulai dari garis batas terluar yurisdiksi nasional, didasarkan pada konsep pertahanan berlapis, pergeseran medan juang dan pertahanan semesta.
- b) Pertahanan Nusantara bersifat dualistik komprehensif yaitu mawas keluar dan mawas ke dalam. Mawas keluar, dimaksudkan bahwa Pertahanan Nusantara menganut konsep pertahanan ke depan (*forward defence*) agar tidak memberi peluang bagi musuh untuk memasuki wilayah yurisdiksi nasional. Mawas ke dalam, mengandung makna bahwa Pertahanan Nusantara mampu menanggulangi setiap bentuk ancaman dari dalam negeri yang telah menyatu (*link-up*) dengan ancaman dari luar negeri.
- c) Pertahanan Nusantara ditata dan diselenggarakan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi baik di masa damai maupun perang, dengan mengerahkan kekuatan nasional. TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung harus senantiasa disiapkan dan dikembangkan agar mampu menghadapi segala bentuk ancaman dari semua front tanpa batas ruang dan waktu.

Berdasarkan dari konsepsi strategi pertahanan nusantara tersebut di atas disusunlah SPLN dengan menentukan:

- a) Sasaran. Tercegahnya niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Tertanggulangnya setiap bentuk ancaman aspek laut yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta berbagai bentuk gangguan keamanan di dalam negeri dan pemberontakan bersenjata di wilayah NKRI. Terciptanya kondisi laut yurisdiksi nasional yang terkendali, utamanya pada ketiga jalur ALKI dan perairan Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina, di perairan Laut Sawu

yang berbatasan dengan Timor Leste dan di perairan Laut Timor yang berbatasan dengan Australia serta terpeliharanya stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi Indonesia.

- b) Strategi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dirumuskan SPLN, yang meliputi: 1) Strategi Penangkalan (*Deterrence Strategy*), diarahkan untuk mencegah niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta yang akan merugikan kepentingan nasional melalui diplomasi angkatan laut, kehadiran di laut terutama di kawasan-kawasan perbatasan yang berpotensi menjadi sumber konflik di masa mendatang, serta membangun kemampuan dan kekuatan TNI AL. 2) Strategi Pertahanan Berlapis (*Layer Defence Strategy*), diarahkan untuk meniadakan dan menghancurkan ancaman dari luar melalui gelar kekuatan gabungan laut dan udara di medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama dan daerah perlawanan, dengan melibatkan kekuatan TNI AL bersama-sama seluruh komponen maritim yang didukung oleh kekuatan TNI AU. Strategi Pertahanan berlapis diterapkan pada masa perang dalam bentuk operasi tempur laut yang mempunyai sifat pertahanan ke depan (*forward defence concept*) dengan tetap memperhatikan konsep pergeseran medan juang.
- c) Strategi Pengendalian Laut (*Sea Control Strategy*), diarahkan untuk menjamin penggunaan laut bagi kekuatan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan, memutus garis perhubungan laut lawan serta mencegah dan meniadakan berbagai bentuk ancaman aspek laut dari dalam negeri melalui gelar kekuatan dalam bentuk Operasi Laut Sehari-hari dan Operasi Siaga Tempur Laut dengan didukung oleh kekuatan TNI AU di perairan-perairan rawan selektif.

B. Pembahasan

Pembahasan ini dirumuskan dari prinsip-prinsip dasar filosofi negara kepulauan, Wawasan Nusantara, dan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN). Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan strategis

antara tujuan (*Ends*), cara (*Ways*), dan sarana (*Means*).

1. Pengembangan Kekuatan Armada Terpadu: *Brown Water* dan *Green Water Fleet*. Menyarankan agar strategi pertahanan perairan pedalaman diwadahi untuk mewujudkan armada perairan pedalaman (*Brown water fleet*) yang mampu melaksanakan kontrol laut (*Sea Control*). Untuk masa depan, TNI AL tidak hanya harus fokus pada kekuatan armada laut lepas (*Blue Water Navy*), tetapi juga secara prioritas mengembangkan kekuatan yang seimbang.
2. *Brown Water Fleet*: Membangun kekuatan khusus untuk perairan pedalaman, selat-selat sempit, dan alur-alur kepulauan yang krusial. Kekuatan ini harus lincah, cepat, dan memiliki daya hancur tinggi untuk operasi di wilayah pesisir dan antar-pulau.
3. *Green Water Fleet*: Memperkuat armada yang mampu beroperasi di seluruh wilayah yurisdiksi nasional, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan jalur-jalur laut strategis seperti ALKI.

Keseimbangan ini merupakan implementasi dari konsep pertahanan dualistik yang "mawas ke dalam" (mengamankan internal) dan "mawas keluar" (mengantisipasi ancaman eksternal). Adopsi Strategi Pertahanan Berlapis Berbasis Teknologi Asimetris.

1. Strategi Pertahanan Berlapis (*Layer Defence Strategy*) adalah salah satu pilar SPLN yang diarahkan untuk menghancurkan ancaman dari luar. Postur masa depan harus menerjemahkan strategi ini dengan memanfaatkan teknologi asimetris untuk dapat menciptakan efek penangkalan (*deterrence*) yang kredibel.
2. Pembahasannya adalah memperkuat postur dengan: Sistem Pengawasan Terintegrasi: Menggabungkan data dari satelit, radar pantai, drone pengintai, kapal patroli, dan kapal selam menjadi satu jaringan pengawasan maritim yang komprehensif.
3. Kekuatan Pemukul Jarak Jauh: Memprioritaskan pengadaan rudal anti-kapal, sistem pertahanan udara berbasis kapal, dan kapal selam modern yang mampu menetralkan ancaman sebelum memasuki wilayah inti pertahanan.
4. Pemanfaatan Sistem Nirawak: Mengembangkan dan mengintegrasikan

kapal permukaan dan bawah air nirawak (*unmanned systems*) untuk tugas-tugas berisiko tinggi seperti pengintaian, peperangan ranjau, dan patroli di garis depan.

Peningkatan Interoperabilitas untuk Keamanan Maritim Semesta. *interoperability* antara semua komponen pertahanan dan keamanan maritim. Postur TNI AL masa depan tidak boleh bersifat eksklusif, melainkan harus dirancang untuk menjadi tulang punggung dari sistem pertahanan semesta di laut. Ini dapat dicapai melalui: Platform dan Sistem Komunikasi Terpadu: Memastikan kapal-kapal TNI AL dapat berkomunikasi dan berbagi data secara *real-time* dengan Bakamla, KPLP, Polairud, dan bahkan komponen pendukung seperti nelayan. Doktrin Operasi Gabungan: Mengembangkan dan melatih doktrin operasi gabungan untuk berbagai skenario, mulai dari penegakan hukum di laut [cite_start]hingga operasi tempur laut skala penuh.

Penataan Gelar Kekuatan Berbasis Geopolitik. Sesuai dengan gagasan filosofis bahwa laut adalah penghubung, postur TNI AL harus mencerminkan prioritas geopolitik nasional. Selain itu, penataan gelar kekuatan harus mengadopsi konsep pertahanan ke depan (*forward defence*). Ini berarti menempatkan aset-aset strategis di pangkalan-pangkalan terluar yang berbatasan langsung dengan potensi konflik, bukan hanya terpusat di pangkalan utama yang jauh dari garis depan. Langkah ini akan mempercepat waktu reaksi dan menegaskan kedaulatan negara secara efektif di perbatasan maritim.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam rangka membangun SPLN agar bisa menjadi lebih sempurna, maka perlu strategi pertahanan perairan pedalaman terwadahi, sehingga tercapai tujuan untuk membangun sinergitas dan interoperabilitas, kekuatan maritim nasional sehingga terwujud *Brown water fleet* yang mampu melaksanakan *Sea Control*.

Fakta Indonesia sebagai negara maritim yang besar dengan geografi kepulauan, sudah merupakan konsekuensi logis dimana perlu memberikan prioritas pembangunan kekuatan TNI AL di kawasan IKN baru untuk mendukung dan mengamankan integritas

kedaulatan maritim. Mengingat masih sedikitnya penelitian tentang pertahanan perairan pedalaman, maka perlu adanya penelitian lanjutan terkait strategi pertahanan Perairan Pedalaman.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Filsafat Negara Kepulauan Indonesia terhadap Strategi Postur TNI AL.

DAFTAR RUJUKAN

- Djalal, Hasjim. (2008). *Indonesian Struggle for the Law of the Sea*. Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1978). *Bunga Rampai Hukum Laut*. Binacipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Kemhan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.
- Kominfo. (2022). https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata.
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). (Berbagai Tahun). *Buku Panduan dan Modul tentang Wawasan Nusantara*. (Publikasi internal Lemhannas sering menjadi rujukan utama).
- Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Seapower up on History*.
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy. Revisi Edisi-6*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putra, I. N. (2016). *Analisis Ancaman Maritim Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis*. Surabaya: CV. Bintang.
- Suradinata, Ermaya. (2005). *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Suara Bebas.
- Shemella, P. (2016). *Global Responses to Maritime Violence*. : Stanford: Stanford University Press.
- Suhardono, E. (2022). *Kebijakan Pertahanan Negara*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Tahar, A. M. (2015). *Penegakan Hukum di Perairan Indonesia. Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan, Serie Monograf, 3(1), 1*. Jakarta.
- Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, khususnya Bagian IV tentang Negara Kepulauan (Archipelagic States).
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.